



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 517 -Insp/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/KEP.1286-INSP/2018 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mensyaratkan dilaksanakannya audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka perlu menetapkan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D.41);
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.1286-Insp/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 700/Kep.1286-Insp/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2013

Pj. BUPATI CIREBON, 



 **DICKY SAROMI**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2013

Pj. BUPATI CIREBON,



DICKY SAROMI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.

JADUAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN Cirebon TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIANSKOD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMBERIKSAAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES									
1	1. Audit Operasional / Audit Kinerja														15	16	17	18	19	20	21	
1	UPT PUSKESMAS MANDU														1. Meningkatkan kepatuhan terhadap Keptuhan Perundang-undangan yang berlaku	1. Tugas dan Fungsi	1. Tata Kelola Keuangan	232,50	1. Melakukan SPK yang meliputi Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Mulu/Cirebon	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen	7	5
2	UPT PUSKESMAS PLUMBON														2. Menela' pelaksanaan prinsip efektif, efisien dan Ekonomis(E)	2. Rengsean Keutangan	2. Tata Kelola Aset	245,00	2. Melakukan pemeriksaan Standar Pelayanan	2. Wawancara Klentasi	7	6
3	UPT PUSKESMAS GEBANG														3. Menela' pelaksanaan prinsip efektif, efisien dan Ekonomis(E)	3. Pengeroleaan Barang Milik Daerah	3. Pengeroleaan Barang Jasa	245,00	3. Melakukan pemeriksaan Standar Pelayanan	3. Analisis data	7	6
4	UPT PUSKESMAS LOSARI														4. Memeriksa kepatuhan terhadap Keptuhan Perundang-undangan yang berlaku	4. Rengsean Aparatur	4. Tata Kelola Pegawai	245,00	4. Melakukan pemeriksaan Standar Pelayanan	4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	6
5	UPT PUSKESMAS KAWARANG														5. Memeriksa kepatuhan terhadap Keptuhan Perundang-undangan yang berlaku			237,50			7	5
6	UPT PUSKESMAS ASTATAJAJURA																	237,50			7	5
7	UPT PUSKESMAS WANURUYOM																	237,50			7	5
8	UPT PUSKESMAS KIDATON																	237,50			7	5
9	UPT PUSKESMAS SINDANGAJIT																	237,50			7	5
10	UPT PUSKESMAS BEBER																	237,50			7	5
11	UPT PUSKESMAS TALUN																	237,50			7	5
12	UPT PUSKESMAS KALIMEDI																	237,50			7	5
13	UPT PUSKESMAS KARANGASARI																	237,50			7	5
14	UPT PUSKESMAS BARAWAN																	237,50			7	5
15	UPT PUSKESMAS SUPAMENGSAJA																	237,50			7	5
16	UPT PUSKESMAS PLEBED																	237,50			7	5
17	UPT PUSKESMAS GEMROL																	237,50			7	5
18	UPT PUSKESMAS WANGIJAHATA																	237,50			7	5
19	UPT PUSKESMAS CIRIGO																	237,50			7	5
20	UPT PUSKESMAS SUSUKALERAW																	237,50			7	5
21	UPT PUSKESMAS KLANENAN																	237,50			7	5
22	UPT PUSKESMAS PALIMANAN																	237,50			7	5
23	UPT PUSKESMAS WATIBELAH																	237,50			7	5
24	UPT PUSKESMAS OLEUDIG																	237,50			7	5
25	UPT PUSKESMAS GESESIK																	237,50			7	5
26	UPT PUSKESMAS DUKURPUNTANG																	237,50			7	5
27	UPT PUSKESMAS PANAYAN																	237,50			7	5
28	UPT PUSKESMAS KARANGSEBLANG																	237,50			7	5
29	UPT PUSKESMAS SEDONG																	237,50			7	5
30	UPT PUSKESMAS SUSUKAN																	237,50			7	5
31	UPT PUSKESMAS JEMMAS																	237,50			7	5
32	UPT PUSKESMAS PASALEMAN																	237,50			7	5
33	UPT PUSKESMAS TEGALGUBUG																	237,50			7	5
34	UPT PUSKESMAS GUNUNG JATI																	237,50			7	5
35	UPT PUSKESMAS PABUARAN																	237,50			7	5
36	UPT PUSKESMAS WINONG																	237,50			7	5

NO	URAIANSKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSEMIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES									
41	DINAS PENDIDIKAN														15	16	17	18	19	20	21	15
42	RISDU ARJAWANANGUN														15	16	17	18	19	20	21	18
43	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN														15	16	17	18	19	20	21	10
44	DINAS PERTANIAN														15	16	17	18	19	20	21	15

- Meningkatkan/kegiatan terhadap Keseluruhan Perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis/KE
- Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berlaku
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan Tindakan yang Hasil Pengawasan BPK RI dan APSP
- Meningkatkan rekomendasi dan saran perbaikan secara mendalam dalam hal pelaksanaan tugas

- Tugas dan Fungsi
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Aset

- Meningkatkan/kegiatan terhadap Keseluruhan Perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis/KE
- Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berlaku
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan Tindakan yang Hasil Pengawasan BPK RI dan APSP
- Meningkatkan rekomendasi dan saran perbaikan secara mendalam dalam hal pelaksanaan tugas

- Tugas dan Fungsi
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Aset

- Meningkatkan/kegiatan terhadap Keseluruhan Perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis/KE
- Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berlaku
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan Tindakan yang Hasil Pengawasan BPK RI dan APSP
- Meningkatkan rekomendasi dan saran perbaikan secara mendalam dalam hal pelaksanaan tugas

- Tugas dan Fungsi
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Aset

- Meningkatkan/kegiatan terhadap Keseluruhan Perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis/KE
- Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berlaku
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan Tindakan yang Hasil Pengawasan BPK RI dan APSP
- Meningkatkan rekomendasi dan saran perbaikan secara mendalam dalam hal pelaksanaan tugas

- Tugas dan Fungsi
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Aset

NO	URAIANSKO	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SARAPAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13	14	
45	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN														15	18	17	18	19	20	21	18	
46	BADAN PENGELOLAAN PEMADATAN DAERAH																						
47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
48	DINAS KELUARGAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA																						

1. Menilai sistem/kegiatan terhadap kegiatan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(E)
 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sudah berjalan
 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan SPI RI dan APSP
 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas
1. Menilai sistem/kegiatan terhadap Kegiatan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(E)
 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sudah berjalan
 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan SPI RI dan APSP
 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas
1. Menilai sistem/kegiatan terhadap Kegiatan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(E)
 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sudah berjalan
 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan SPI RI dan APSP
 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas

1. Topik dan Fungsi
 2. Pengalokasian Keuangan
 3. Pengalokasian Barang Milik Daerah
 4. Pengalokasian Aparatur
1. Tabir Kelemba Keuangan
 2. Tabir Kelemba Aset
 3. Pengalokasian Barang Jasa
 4. Tabir Kelemba Pegawai

175,00 - Risiko tingkat Pengawasan Perencanaan Daerah

187,50 - Mengetahui SPPTD yang memiliki Program Unggulan Kecamatan Daerah, yaitu Cerdas Koneksi Sesi, Berbudaya dan Cemerlang Distrikasi Wisata

1. Desk Audit
 2. Wawancara Dokumen
 3. Wawancara Staf/Staff
 4. Analisis data
 5. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik
1. Desk Audit
 2. Wawancara Dokumen
 3. Wawancara Staf/Staff
 4. Analisis data
 5. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik

NO	URAIAN SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13	14		
49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															15	18	17	155,00	18	18	20	21	15
50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		157,50	18	18	8	15	15
51	BADAN KEPESAWAMAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		152,50	18	18	8	15	15
52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBEBARDAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		137,50	18	18	6	15	15

NO	URAIAN SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMBERKSAAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13	14
	Il. Audit Kinerja														15	16	17	18	19	20	21	
53	NSUD WALED														Untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	252,00 SKPD	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Perumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Katalogis kerja *Program Logic	8	5
54	RSUD KARYAWANAGUN														Untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	230,00 SKPD	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Perumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Katalogis kerja *Program Logic	8	5
55	BADAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH														Untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	175,00 SKPD	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Perumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Katalogis kerja *Program Logic	8	5
56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														Untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50 SKPD	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Perumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Katalogis kerja *Program Logic	8	5

NO	URAIAN/KINDO	RENCANA JADWAL PENYAJIANNYAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMBERIKSAAN				
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES											
1	II. Peningkatan Tujuan Tertentu													15	16	17	18	19	20	21				
57	Pasal Pengadaan Barang dan Jasa													1. Menaklukkan/keputusan terhadap kegiatan Pengadaan yang baik 2. Menaklukkan prinsip ekonomi, efektif dan Efisien/CEI 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan biaya	Proses Pengadaan barang dan jasa dan nilai perolehan dan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	PPKD, Laporan Keuangan meliputi RA, Hesa, LOPE, LAK dan OLUK 1. Keseluruhan antara Penerimaan dengan pembelanjaan 2. Fergasi dan informasi yang dapat di analisis 3. Program dan kegiatan yang relevan 4. Keadaan yang menantang teresanya	Resiko terkait kompetensi Pengadaan barang dan jasa	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klirifikasi 3. Analisis Sile 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	7				
	III. Peningkatan Lainnya																							
58	Riwayat LKPD													1. Mengikuti LKPD per 31 Desember 2017 baik disusun berdasarkan SPI yang relevan dan dapat berespon	LKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon TA.2017, LK SKPD TA 2017	sebagai bentuk dukungannya Pengajian k. kerja dan satuan pengukuran kinerja 2. Penelitian terhadap prosedur dan pengingntaran internal hingga 3. Evaluasi terhadap Program dan kegiatan 4. Evaluasi terhadap kegiatan SKPD yang bersangkutan								
59	Evaluasi Laku													1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP, tingkat akurasi atau pengingntaran atas hasil (outcome) terhadap pengingntaran anggaran dan tugas kewajibannya pemerintah yang berespon kepada hasil (Result Oriented Government) 3. Sasarannya implementasi 4. Hasil Evaluasi periode sebelumnya	Documen Rencana Kerja Anggaran SKPD TA 2018	Penilaian dan pengingntaran dokumen Rencana Kerja Anggaran	Keterkaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pengingntaran	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klirifikasi 3. Analisis dan 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	30	15				
60	Rencana Kerja Anggaran TA 2018													1. Menaklukkan/keputusan terhadap kegiatan Pengadaan yang baik 2. Menaklukkan prinsip ekonomi, efektif dan Efisien/CEI 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan biaya	Documen Rencana Kerja Anggaran SKPD TA 2018	Penilaian dan pengingntaran dokumen Rencana Kerja Anggaran	Keterkaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pengingntaran	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klirifikasi 3. Analisis dan 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	50	15				
61	Peningkatan Kinerja Pengadaan													1. Menaklukkan/keputusan terhadap kegiatan Pengadaan yang baik 2. Menaklukkan prinsip ekonomi, efektif dan Efisien/CEI 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan biaya	Penelitian Kabupaten Cirebon	SKPD/PAKD dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	Uraian/penyababnya wewenang, insidial, tindakan korupsi	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klirifikasi 3. Analisis dan 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	6	5				

NO	URAIAN SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2016												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMBERKSAAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES									
1	V. Jasa Konsultasi														15	16	17	18	19	20	21	
2	Kontraktor dan Socialisasi														Membahas pemahaman terkait kebijakan produk mutlak, dan prosedur terapanp penyediaan layanan jasa listrik	Pemerintah Kabupaten Cirebon	SKPD JPKD dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon					

Keterangan
 Terlibat


 Pj. BUPATI CEREBON
 DICKY SAROMI

